

KONSEP HANNAH ARENDT TENTANG POLITIK SEBAGAI PEMBICARAAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENYIKAPI PLURALITAS PANDANGAN

Yosef Keladu Koten

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero,

Maumere 86152, Flores, NTT

Pos-el: yosaya_25@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v18i1.163.123-148>

Abstract: Differences in views in a plural community cannot be avoided because each view or philosophy of life is formulated by reasonable people. It is generally accepted that the plurality of life views must be addressed in the spirit of democracy that relies on the use of reason, where each person or group is given the opportunity to convey their perspectives. But the fact shows that the role of reason is getting weaker in deliberation, especially in countries that implement a system of representative democracy. Then, do we thus abandon democracy as an approach in addressing differences of opinion? Using a qualitative approach, the author argues that democracy remains the best choice in addressing differences of views. However, based on Arendt's concept of politics as a speech, the ideal democratic approach should be deliberative rather than liberal because deliberative democracy aims to transform the perspective of each person or group.

Keywords: politics, pluralism, common sense, agonistic, liberal democracy, deliberative democracy, political speech.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah komunitas plural di mana masyarakat dibagi oleh keyakinan, kelas sosial, budaya dan agama, ketidaksepakatan atau

perbedaan pandangan selalu muncul. Ketidaksepakatan muncul karena kenyataan bahwa ada banyak pandangan atau falsafah hidup yang berbeda dan tidak cocok satu sama lain. John Rawls menyebut kondisi ini sebagai pluralisme masuk akal (*reasonable pluralism*), yang muncul karena setiap pandangan dirumuskan oleh orang-orang yang berakal budi sehat dan “mulai dari dalam pandangan komprehensif mereka sendiri dan bertolak dari dasar religius, filosofis dan moral mereka sendiri.”¹ Sementara itu Chantal Mouffe menyebut pluralisme masuk akal ini dengan pluralisme agonistis karena dalam politik selalu ada perjuangan, konflik atau persaingan tentang isu-isu atau masalah-masalah bersama. Atau, politik selalu berkarakter demokratis karena terdiri atas *domesticating enmity* dengan mengizinkan pandangan-pandangan yang bersaing untuk ada dalam relasi manusia.²

Perbedaan pandangan sulit direkonsiliasikan dan karena itu dibutuhkan proses demokratis, di mana ketidaksepakatan diselesaikan dalam semangat mayoritas. Sistem demokrasi mengandalkan semangat mayoritas dan penggunaan akal budi, entah untuk berpikir, berdiskusi, berdebat atau mengambil sebuah keputusan kolektif. Tetapi, sebagaimana diklaim oleh Al Gore dalam bukunya *The Assault of Reason*, peran akal budi semakin melemah dalam proses deliberasi karena menyebarluasnya disinformasi yaitu informasi yang menyesatkan karena disampaikan tidak pada tempatnya, tidak relevan, terfragmentasi atau dangkal. Akibatnya, perjuangan bersama untuk menentang sesuatu yang tidak benar semakin sulit dan sebaliknya informasi yang benar seperti konsensus ilmiah tentang krisis global iklim tidak mudah diterima.³ Kebenaran obyektif semakin tidak berdaya di hadapan orang pada pada zaman *post-truth*, yang lebih

1 John Rawls, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1996, hlm. 144

2 Mouffe membedakan antara *'the political'* dan *'politics'*. *'The political'* menunjuk pada antagonisme inheren dalam komunitas manusia yang bisa mengambil bentuk berbeda-beda dan muncul dari relasi sosial yang beranekaragam. Sedangkan *'politics'* menunjuk pada praktik-praktik, diskursus atau institusi-institusi yang berupaya untuk membangun keteraturan dan mengorganisasikan koeksistensi manusia dalam sebuah kondisi konflikual. Bertolak dari perbedaan ini, Mouffe lalu mengklaim bahwa politik demokrasi mengandaikan pengakuan akan sebuah antagonisme yang tidak perlu diatasi. Bdk. Chantal Mouffe, "Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism," dalam *Social Research*, Vol. 66, No. 3, hlm. 754-755.

3 Albert Gore, *The Assault of Reason*, London: Penguin Books Ltd., 2017.

suka percaya pada yang mereka sukai dan bukan pada apa yang terbukti secara ilmiah benar.

Hannah Arendt menyebut kondisi disinformasi di atas dengan masa kegelapan (*dark times*),⁴ di mana kebanyakan diskursus atau pembicaraan publik, terutama oleh pejabat publik, tidak mengungkapkan apa yang terjadi tetapi menyembunyikan fakta-fakta di ruang publik. Akibatnya, segala sesuatu yang riil atau otentik dirusak oleh kekuatan 'mere talk' yang muncul dari ruang publik. Itulah kekuatan rasionalisasi, mekanisme pembelaan diri, sebuah cara mempertahankan diri secara rasional demi menghindari diri dari persoalan kontroversial. Di samping rasionalisasi, kekuatan lain yang menyebarkan kegelapan adalah penipuan politis, kebohongan yang keluar dari mulut seorang pejabat politik dan dirancang untuk mengabulkan fakta-fakta obyektif. Arendt pesimis terhadap potensi penguasa politik untuk berbicara tentang kebenaran karena dalam kalangan pejabat publik kebenaran tidak mendapat tempat yang semestinya; sebaliknya kebohongan dianggap sebagai sarana demi mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Menurutnya, kebenaran faktual selalu berada dalam bahaya dikeluarkan dari dunia bukan hanya untuk sementara waktu tetapi untukselama-lamanya.⁵

Informasi menyesatkan yang dihadirkan ke ruang publik sebagai sebuah hiburan murahan menciptakan ilusi bahwa orang mengetahui kebenaran tentang sesuatu padahal dalam kenyataan tidak. Akibatnya, masyarakat mengabaikan bukan hanya pemikiran kritis tetapi juga penggunaan akal budi dalam menyikapi apa yang dihadirkan ke hadapan mereka. Ruang bagi masyarakat yang bebas dan sederajat untuk berdebat atau berdiskusi atas dasar bukti-bukti terbaik yang tersedia tertutuhlm.

4 Arendt mengatakan bahwa masa kegelapan menunjuk bukan hanya pada tragedi-tragedi kemanusiaan seperti genosida, penculikan dan pembunuhan, penghilangan secara paksa nyawa orang lain, tetapi juga pada fenomena bagaimana tragedi kemanusiaan tersebut dipublikasikan di ruang publik. Menurutnya, kebanyakan diskursus publik tentang sebuah kejahatan bukannya mencerahkan atau mengiluminasi peristiwa tragis tersebut tetapi sebaliknya menutupi fakta-fakta krusial di balik kejadian tersebut. Inilah yang disebutnya dengan invisibilitas publik, di mana fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah tragedi digelapkan oleh "highly efficient talk and double talk", yang pada umumnya datang dari pemerintah dan politikus untuk "explain away unpleasant facts and justified concerns." Bdk. Hannah Arendt, *Men in Dark Times*, New York: A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, 1955, hlm. viii.

5 Hannah Arendt, *Between Past and Future*, New York: The Viking Press, 1961, hlm. 231

Ketimbang berdebat secara rasional dengan mengandalkan kemampuan akal budi, masyarakat justru mengosumsi informasi-informasi yang disajikan secara tidak kritis.

Memang benar, peran akal budi semakin melemah dalam deliberasi dan hal ini sangat berbahaya dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi representatif. Tetapi, apakah dengan alasan ini kita meninggalkan demokrasi sebagai sebuah pendekatan dalam menyikapi perbedaan pandangan dalam sebuah komunitas plural? Dalam artikel ini, penulis beragumen bahwa demokrasi, khususnya demokrasi deliberatif tetap menjadi pilihan terbaik sebagai sebuah metode pendekatan dalam menyikapi perbedaan pandangan dan sekaligus dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik. Dibandingkan dengan demokrasi liberal, pendekatan demokrasi deliberatif masih lebih efektif dan cocok karena memperlakukan warga negara sebagai pribadi yang bebas, sama, serta rasional. Lagi pula, pendekatan ini menggunakan akal budi bukan dalam arti instrumental ataupun utilitarian, seperti dipahami oleh kaum liberal.

Untuk mendukung tesis tersebut di atas, berturut-turut penulis akan menguraikan: (1) pendekatan demokrasi liberal untuk melihat kelemahan pendekatan ini; (2) konsep Arendt tentang politik sebagai pembicaraan. Poin ini penting karena menurut hemat saya, konsep Arendt ini menjadi benih munculnya pendekatan deliberatif; (3) pembicaraan politik dan demokrasi deliberatif. Pada bagian ini akan diuraikan kekhasan deliberasi yang ditawarkan Arendt, yaitu bahwa deliberasi dibuat bukan pertama-tama untuk mencapai konsensus, tetapi untuk mentransformasi pandangan-pandangan yang berbeda-beda.

PENDEKATAN DEMOKRASI LIBERAL

Prestasi gemilang modernitas yang mendasari liberalisme modern adalah individualisme dan keunggulan akal budi instrumental. Individualisme mengisyaratkan bahwa masing-masing individu memiliki hak untuk memilih bagi dirinya, cara hidupnya sendiri, untuk memutuskan keyakinan apa saja yang mau diadopsi, dan untuk menentukan bentuk-bentuk hidup yang cocok untuk dirinya. Individualisme ini sejalan dengan keunggulan akal budi instrumental, di mana akal budi dipahami sebagai

“sejenis rasionalitas yang dipakai sebagai sarana untuk tujuan tertentu.”⁶

Akal budi dilepaskan dari rantai keberadaan di sekitar kita. Proses ini dimulai oleh Descartes dalam proses penguasaan alam semesta oleh rasionalitas. Penguasaan alam, dalam pandangan Descartes, adalah penguasaan secara rasional. Itulah persoalan kontrol instrumental atas dunia. Akal budi mendominasi dunia karena akal budi memiliki kekuasaan untuk mengejawantahkan bagian material, dunia, dan juga kehendak. Akal budi memikirkan apa yang ada di luar dirinya. Descartes menulis: “Lewat filsafat kita dapat mengetahui kekuatan dan perilaku api, air, udara, dan bintang, langit dan semua benda lain dalam lingkungan kita, ...dan kita dapat menggunakan pengetahuan ini demi semua maksud yang cocok dan membuat diri kita tuan atas alam.”⁷ Akibatnya, mengetahui realitas sekitar berarti memiliki representasi yang benar tentang benda-benda. Gambaran yang tepat tentang realitas luar muncul oleh karena kerja akal budi. Alam semesta tidak mempunyai arti apapun juga kalau intelek tidak membentuk ide-ide yang memenuhi standar kepastian.

Pemahaman akal budi seperti ini dikembangkan lebih lanjut dalam usaha merumuskan kebebasan manusia dan sumber moralitas. Descartes mulai dengan klaim bahwa keinginan untuk mencapai kehidupan yang baik harus datang dari pengertian individu tentang martabatnya sendiri sebagai ada yang rasional.⁸ Dengan ini, sumber moral tidak lagi ada dalam keteraturan alam atau dalam kehendak Allah, tetapi dalam rasionalitas manusia. Rasionalitas adalah sumber kekuasaan moral. Supaya menjadi bebas secara moral, seseorang harus membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh eksternal, termasuk keinginannya sendiri dengan menjadikan semua itu berada di bawah bimbingan akal budi instrumental. Dengan demikian, orang hanya taat pada akal budi.⁹ Jadi, tidak ada lagi struktur ilahi, yang pernah dianggap sebagai pemberi makna dan sumber moralitas manusia dan karena itu setiap pengaturan sosial dan model tindakan

6 Charles Taylor, *The Ethics of Authenticity*, Cambridge: Harvard University Press, 1991, hlm. 5

7 Rene Descartes, *Discourse on Method*, dalam *The Philosophical Writings of Descartes*, John Cottingham, cs. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1985, hlm. 142-143

8 *Ibid.*, hlm. 152

9 *Ibid.*, hlm. 156

terbuka untuk dirancang kembali demi kesejahteraan individu-individu.

Internalisasi sumber-sumber moral mengantar pada tema modern tentang martabat pribadi manusia yang memiliki tempat penting dalam pemikiran etika dan politik modern. Jean-Jacques Rousseau, misalnya, menghadirkan isu tentang moralitas sebagai mengikuti suara dalam diri kita. Suara ini sering kali dipengaruhi oleh keinginan dan kepercayaan pada orang lain. Karena itu, seseorang harus menemukan kembali kontak otentik moral dengan dirinya sendiri. Kontak yang intim dengan diri sendiri yang disebut perasaan eksistensial merupakan sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Rousseau menulis: “Saya telah belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa sumber kebahagiaan yang sejati ada dalam diri kita...”¹⁰ Berkaitan dengan ide ini, Rousseau lalu mengembangkan ide tentang kebebasan menentukan diri sendiri, dalam arti bahwa seseorang bebas hanya jika dia memutuskan tanpa pengaruh dari luar hal-hal yang paling berhubungan dirinya sendiri. Kebebasan menentukan diri sendiri mengandaikan bahwa individu memutuskan bagi dirinya sendiri dan melepaskan diri dari semua tekanan eksternal. Dalam konteks ini, kebebasan lalu dimengerti sebagai kekuatan untuk memutuskan yang ada dalam diri subyek sendiri. Pemahaman ini bertentangan dengan pemahaman klasik tentang kebebasan sebagai ada yang berorientasi pada kebaikan final, di mana intelek menghadirkan kebaikan dan kehendak bertindak sesuai dengan kebaikan tersebut.

Pengertian kebebasan moral dan keunggulan akal budi memberikan kontribusi kepada otonomi liberal modern yang berarti pembebasan lewat akal budi dari otoritas eksternal. Manusia memiliki kebebasan memilih dan kemampuan untuk membuat keputusan. Akal budi dilihat sebagai sumber pertama otoritas. Akibatnya, model hidup yang dipertimbangkan secara rasional lebih superior dibandingkan dengan kehidupan yang bergantung pada tradisi atau iman. Seseorang hendaknya membuat pilihannya sendiri dalam hidup dan bukannya bergantung pada determinasi eksternal. Kebaikan bersama memang masih diperhitungkan

10 Jean-Jacques Rousseau, *Reveries of the Solitary Walker*, pen. Peter France, London: Penguin Books, 1979, hlm. 36

tetapi kebaikan itu harus merupakan hasil refleksi atau pemikiran individu. Bagi kaum liberal, kehendak individual manusia lebih dahulu ada daripada konsep tentang kebaikan bersama dan tentang semua nilai. “Apa yang mempertahankan semua posisi yang berbeda-beda adalah bahwa kehendak individual manusia merupakan dorongan yang menggerakkan kita lebih dulu dari semua yang lain dan juga dari semua nilai.”¹¹

Pengertian otonomi liberal modern ini mendominasi pendekatan liberal. Berhadapan dengan perbedaan pandangan, kaum liberal memberikan tempat pertama kepada otonomi individu. Dalam pandangan liberal, individu atau kelompok-kelompok sosial diandaikan mampu untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Mereka dapat membuat keputusan sendiri tentang apa yang penting dan bernilai, yang memberikan makna kepada hidup mereka. Hal itu berarti bahwa keputusan terakhir hendaknya diserahkan kepada masing-masing individu. Masing-masing warga negara diizinkan untuk bertindak atas dasar keyakinannya sendiri tanpa pembatasan dari orang lain ataupun dari negara.

Hal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa setiap perbedaan pandangan yang tidak dapat direkonsiliasikan hendaknya tidak boleh dimasukkan ke dalam agenda politik atau tidak boleh menjadi subyek regulasi, tetapi menjadi urusan pribadi: “Kebijakan yang tidak dapat dijustifikasi oleh akal budi yang tepat dikeluarkan dari konstitusi tertulis atau tak tertulis.”¹² Inilah yang disebut dengan prinsip penghindaran (*preclusion*), yang merupakan aplikasi lebih lanjut dari prinsip konvensional netralitas negara. Prinsip netralitas dimulai dengan sikap skeptis atas justifikasi rasional tentang posisi moral dan religius. Dalam kasus ketiadaan klaim rasional atas kebenaran, negara hendaknya bersikap netral atau tidak memihak, dan tidak boleh bertindak. Hal ini mengarah kepada pengeluaran posisi tersebut dari agenda politik.

Secara umum, berhadapan dengan perbedaan pandangan, kaum demokrat liberal berusaha untuk mengeluarkan pertentangan dari agenda

11 Kenneth Schmitz, “Is Liberalism Good Enough?” dalam *Liberalism and the Good*, Bruce Douglas, cs., (eds.), London: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1990, hlm. 90

12 *Ibid.*, hlm. 125

politik dan membiarkan keputusan pada masing-masing individu. Dalam pikiran kaum demokrat liberal, hak dan kepentingan individu merupakan pertimbangan mendasar dalam proses penentuan apa yang hendaknya dimasukkan dalam kebijakan publik. Bertolak dari pandangan ini, sebuah kebijakan publik harus merupakan hasil dari negosiasi, setelah memberikan pertimbangan yang sama atas semua posisi dan menjawab kepentingan individu.¹³ Pendekatan yang berbasiskan kepentingan ini mengandaikan bahwa pembuatan keputusan demokratis pertama-tama dimaksudkan untuk memutuskan kebijakan yang menguntungkan mayoritas masyarakat, di mana masing-masing individu menentukan kepentingannya sendiri. Dalam proses ini, individu-individu dan kelompok-kelompok kepentingan memutuskan, kebijakan mana yang akan menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Karena itu, pembuatan keputusan kolektif dianggap demokratis hanya kalau itu merupakan hasil dari pertimbangan ide-ide dan kombinasi dari individu-individu yang memiliki kepentingannya sendiri.

Sayangnya, prinsip liberal yang membiarkan keputusan ada di tangan masing-masing individu tampaknya evasif karena berfokus pada irasionalitas dan privatisasi proses publik.¹⁴ Hal ini bertolak dari kenyataan bahwa hanya dalam terang kepentingannya sendiri, individu dapat mengakui kepentingan orang lain dalam sfer publik dan berbicara satu sama lain tentang kepentingan kolektif sebagai sesuatu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan individual. Di sini, masing-masing individu bisa berpikir atau mempertimbangkan secara kolektif tentang sarana untuk mencapai tujuannya sendiri. Inilah yang disebut dengan privatisasi proses publik.

Lagi pula, hasil rata-rata atau mayoritas yang dicapai bukanlah secara otomatis rasional atau lewat proses pemikiran publik. Sering kali terjadi, dalam proses tawar menawar untuk memperoleh persetujuan mayoritas, individu-individu lebih mengandalkan aspek perasaan seperti kesamaan

13 Joshua Cohen, "Democracy and Liberty," dalam *Liberative Democracy*, John Elster (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1998, hlm. 186

14 Irish Young, "Communicative and the Other: Beyond Deliberative Democracy," dalam *Democracy and Difference*, Seyla Benhabib (ed.), Princeton: Princeton University Press, 1996, hlm. 121

kultural, etnis, agama, dan lain-lain. Ketika harus dilakukan pemungutan suara, orang tidak lagi menggunakan rasionalitasnya dan menilai secara jujur pandangan mana yang lebih rasional dan masuk akal tetapi semata-mata karena ikatan emosional. Hal ini berarti bahwa pemikiran publik tidak menjadi pertimbangan utama. Inilah yang disebut dengan irasionalitas publik.

Lebih lanjut, prinsip menghindarkan isu-isu yang tidak bisa diperdamaikan dari agenda politik, tampaknya terlalu bergantung pada hak individu-individu, sehingga terlalu banyak isu-isu penting dikeluarkan dari agenda politik. Dan, isu-isu yang pada suatu saat dianggap bersifat privat dan perlu diputuskan secara pribadi, telah memiliki signifikansi publik. Karena itu, perlu dibiarkan isu-isu kontroversial dipublikasikan dan menjadi subyek legislasi karena dengan cara ini, warga negara atau wakil-wakil diberi kesempatan untuk berpikir dalam proses deliberasi publik.¹⁵ Proses ini mengandaikan bahwa lewat deliberasi publik, warga negara secara pribadi menangkap signifikansi posisi mereka sendiri dan juga posisi orang lain. Hal ini dapat mengantar kepada pemahaman bersama tentang apa yang sedang diperdebatkan sehingga sebuah persetujuan timbal balik dapat muncul. Inilah yang dianjurkan oleh kaum demokratis deliberatif lewat pendekatan demokratis deliberatif.

POLITIK SEBAGAI PEMBICARAAN

Dalam karya-karya politiknya, terungkap dengan jelas kekhasan Arendt dalam berfilsafat, yaitu dari sudut pandang pluralitas, sebuah kondisi kesamaan dan sekaligus perbedaan. Itulah kondisi persamaan dalam perbedaan karena manusia adalah anggota dari spesies yang sama sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain, tetapi setiap pribadi mengungkapkan keunikannya lewat tindakan dan pembicaraan. Atau, semua manusia tercebur ke dalam sebuah kondisi pluralitas. Hal ini menjelaskan mengapa interaksi atau intersubyektivitas sangat sentral dalam pemikiran politik Arendt. Pluralitas mengindikasikan bahwa politik pada dasarnya adalah pembicaraan atau perdebatan konstan.

15 Amy Gutmann dan Dennis Thompson, *Democracy and Disagreement*. Cambridge: Harvard University Press, 1996, hlm. 134

Dalam konteks ini, semua anggota komunitas berpartisipasi aktif dalam aktivitas debat dan deliberasi tentang kodrat, peran dan tanggung jawab politik.

Arendt menempatkan manusia yang kreatif pada pusat penelitian politiknya. Lewat kreativitas bertindak, berpikir dan menilai, dunia atau sfer politik diciptakan. Hal ini berarti bahwa ada sebuah relasi ketergantungan antara individu-individu dan komunitas politik sebagai ruang penampakan. Individu-individu bergantung pada keberadaan sebuah sfer publik, di mana mereka dapat bertindak dan berbicara; dan sebaliknya, sebuah komunitas manusia bergantung pada individu-individu yang menciptakan dan mempertahankan sfer publik lewat tindakan. Ketergantungan antara individu dan komunitas politik, diformulasikan oleh Knauer sebagai berikut: "Tindakan adalah esensi dari politik, dalam arti bahwa hanya dalam sebuah ruang publik, individu-individu dapat bertindak dan individu-individu yang bertindak dapat menciptakan dan mempertahankan sebuah komunitas politik."¹⁶

Penegasan Arendt bahwa politik hendaknya sebuah diskusi atau deliberasi yang berlangsung terus di antara orang-orang yang sederajat ditarik dari Aristoteles yang mengklaim bahwa deliberasi melibatkan sebuah model khas berpikir yang disebut *phronesis* atau kebijaksanaan praktis, kemampuan untuk berpikir pada level praktis. Bagi Aristoteles, deliberasi adalah sebuah aktivitas intelektual di mana kita mempertimbangkan instrumen atau sarana demi kehidupan yang baik yang disebut kebahagiaan.¹⁷ Bertolak dari konsep Aristoteles tentang *phronesis*, Arendt

16 James Knauer, "Rethinking Arendt's *Vita Activa*: Toward A Theory of Democratic Praxis," dalam *Praxis International*, Vol. 5, No. 2, 1985, hlm. 185

17 Tujuan atau kehidupan yang baik dalam dirinya sendiri tidak menjadi subyek deliberasi; tetapi hanya sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kita sudah mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan mulau berdeliberasi tentang bagaimana mencapai tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, seorang dokter tidak mempertimbangkan, entahkah dia akan merawat seorang pasien atau tidak karena adanya sebagai dokter menjadikan perawatan orang sakit sebagai tujuan permanennya. Yang harus dipertimbangkan oleh seorang dokter adalah bagaimana dia merawat pasien, yang merupakan tujuan tindakannya. Prosedur pemikiran harus dimulai dengan tujuan lalu bekerja ke belakang untuk melihat apa yang diperlukan agar tujuan dicapai. Di sini, deliberasi berarti proses memilih sarana-sarana terbaik setelah mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Untuk itu kita perlu memiliki yang disebut Aristoteles *phronesis* atau kebijaksanaan praktis. Bdk. Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terence Irwin (pen.), Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1999, NE 1112a-1113a.

mengklaim bahwa, seperti dikatakan oleh Habermas, deliberasi dalam ruang publik adalah praktis karena deliberasi menciptakan pemahaman timbal balik di antara orang-orang yang sederajat.¹⁸

Sekalipun demikian, tidak seperti Aristoteles, Arendt berpendapat bahwa obyek dari deliberasi bukanlah sarana tetapi tujuan, yaitu politik itu sendiri. Dari perspektif Arendt, politik menunjuk pada, seperti ditegaskan Villa: “*Speech-making and decision-taking, the oratory and business, the thinking and the persuading.*”¹⁹ Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam perdebatan tentang rangkaian tindakan yang mungkin dalam sfer politik, warga negara dilibatkan dalam deliberasi tentang apa yang baik. Atau dengan kata lain, kebaikan yang hendak dicapai diartikulasikan ketika warga negara berdeliberasi tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil. Hal ini berarti bahwa tujuan merupakan elemen konstitutif dari deliberasi politik itu sendiri. Tujuan bukanlah sesuatu yang ada terpisah dari proses. Villa menulis: “Deliberasi politik yang sejati tidak bergerak pada level ‘*in order to*’, tetapi lebih pada level ‘*for the sake of*’: itu berkaitan dengan makna dari kehidupan kita yang umum.”²⁰

Lebih lanjut, Arendt beragumen bahwa deliberasi dapat menjadi publik karena semua manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan menilai. Arendt berulang kali mengklaim bahwa politik secara otentik diungkapkan kapa saja masyarakat berada bersama dalam ruang publik untuk berdiskusi, berdeliberasi dan memutuskan persoalan-persoalan bersama. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembuatan keputusan adalah kemampuan umum dari semua warga negara dan bukan hanya dimiliki oleh elit politik tertentu saja. Dalam esainya “*The Crises in Culture*,” seperti termuat dalam *Between Past and Future*, Arendt memperjelas idenya bahwa putusan memampukan kita semua untuk mengorientasikan diri kita ke dalam wilayah publik dan menilai segala sesuatu yang ada di dalamnya

18 Jürgen Habermas, “Three Normative Models of Democracy,” dalam *Democracy and Difference—Contesting the Boundaries of the Political*, Seyla Benhabib (ed.), Princeton: Princeton University Press, 1996, hlm. 151

19 Dana Villa, Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, Princeton: Princeton University Press, 1996, hlm. 32

20 *Ibid.*

dari perspektif obyektivitas dan imparsialitas.²¹

Dalam menegaskan esensi politik sebagai tindakan dan pembicaraan, Arendt ingin menunjukkan bahwa aktivitas debat, deliberasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan merupakan elemen-elemen penting dalam politik. Karena itu, yang dibutuhkan dalam politik adalah mempertahankan pluralitas perspektif lewat upaya membiarkan semua aktor politik untuk mengeskpresikan pendapat mereka karena Arendt percaya bahwa warga negara mempunyai kemampuan untuk berjuang secara terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup mereka bersama tanpa adanya fanatisme atau tanpa ada niat untuk mengeliminasi orang yang bertentangan dengan kita. Karena itu, adalah tepat kalau Lisa Disch menyimpulkan bahwa kualitas pembicaraan politik Arendt adalah bahwa pembicaraan tidak menghasilkan satu akibat pun. Kenyataannya, bagi Arendt, pluralitas perspektif atau perbedaan bukanlah sebuah problem dan bukan sekedar asset tetapi sebuah keharusan bagi politik demokratis.²² Atau seperti dikatakan oleh Honig: “...*politics never gets things right, over and done with. This conclusion is not nihilistic but radically democratic.*”²³

Karena perbedaan merupakan sesuatu yang penting dalam politik, maka signifikansi pembicaraan politik terletak dalam kenyataan bahwa pembicaraan menyediakan ruang bagi perdebatan politik. Di sini, perdebatan bukanlah sesuatu yang kasar karena orang yang terlibat di dalamnya mempunyai keinginan yang sama untuk mengartikulasikan ide-ide atau argumen-argumen secara baik dan bersama-sama bersedia untuk dikritik oleh yang lain. Perdebatan muncul bukan karena orang secara sengaja menciptakan konflik tetapi karena konflik itu inheren dalam perbedaan. Karena itu, bagi Arendt, sfer publik tidak pernah netral atau sebuah tempat di mana orang menghindari diri dari perbedaan agar hidup dalam sebuah kedamaian universal. Sebaliknya, apa yang diramalkan oleh

21 Hannah Arendt, *Between Past and Future*, *op. cit.*, hlm. 221

22 Lisa Disch, ““Democracy, Difference, and Plurality,” dalam *The Newsletter of PEGS*, Vol.2. No. 2, 1992, hlm. 16

23 Bonnie Honig, *Political Theory and the Displacement of Politics*, Ithaca dan London: Cornell University Press, 1993, hlm. 210

Arendt adalah sebuah ruang publik di mana orang-orang yang berbeda beragumen, berdeliberasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan semua orang dengan keinginan, kehebatan dan integritas.²⁴ Karena itu adalah benar bahwa ada sebuah elemen agonistik dalam konsep Arendt tentang pembicaraan politik. Atau, akan selalu ada sebuah perjuangan, konflik dan perdebatan yang abadi dalam sebuah komunitas plural.

PEMBICARAAN POLITIK DAN DEMOKRASI DELIBERATIF

Sebagaimana diuraikan di atas, pembicaraan politik berurusan dengan perdebatan yang melibatkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Inilah dasarnya mengapa Arendt menyimpulkan: “*Debate constitutes the very essence of political life.*”²⁵ Tetapi, apakah dengan menegaskan realitas perdebatan, pembicaraan politik otomatis mengandung elemen deliberatif? Lisa Disch dan Bonnie Honig menyangkal elemen deliberatif dalam pengertian pembicaraan Arendt.

Disch beragumen bahwa dari perspektif Arendt, supaya menjadi publik, sebuah peristiwa tidak menuntut deliberasi, tetapi hanya perlu dilihat dan didengar oleh yang terlibat atau bisa terlibat dan melibatkan pluralitas sudut pandang.²⁶ Sementara Honig, dalam menginterpretasi tindakan politik Arendt dari perspektif feminisme, beragumen bahwa pembelaan Arendt terhadap pluralitas dan perbedaan hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan identitas individu-individu atau kelompok-kelompok, seperti feminisme. Akibatnya, yang dipentingkan Arendt bukan hanya ada bersama yang lain tetapi juga ada bertentangan dengan yang lain, sesuatu yang penting untuk menentang hegemonisasi dan mengizinkan kemungkinan pengungkapan identitas baru. Bagi Honig, ketimbang deliberasi, politik Arendt dapat dianggap sebagai sebuah “*a practice of re-founding, augmentation and amendment.*”²⁷

24 Patricia Roberts-Miller, “Fighting without Hatred: Hannah Arendt’s Agonistic Rhetoric, dalam *Jac*, Nov. 22, No. 3, hlm. 589

25 Hannah Arendt, *Between Past and Future*, *op. cit.*, hlm. 241

26 Lisa Disch, *The Tyranny of the Two-Party System*, New York: Columbia University Press, 2002, hlm. 118

27 Bonnie Honig, “Toward an Agonistic Feminism: Hannah Arendt’s and the Politics of Identity,” dalam *Feminist Interpretation of Hannah Arendt*, Bonnie Honig (ed.), Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1995, hlm. 160

Berbeda dengan interpretasi Disch dan Honig, penulis beragumen bahwa ide Arendt tentang pembicaraan politik memberikan pemahaman baru terhadap pendekatan deliberatif dalam berurusan dengan pluralisme yang masuk akal. Pengakuan akan aspek agonistik dalam konsep politik Arendt tidak mengeliminasi deliberasi, tetapi sebaliknya, agonisme dapat berlangsung dalam proses deliberatif atau seperti apa yang disebut oleh Samuel Chambers sebagai *'the agonistic discourse.'* Ditarik dari pengertian Yunani tentang *agon*, yang secara asali menunjuk pada sebuah perdebatan yang menegaskan pentingnya sebuah perjuangan, sebuah wacana agonistik ditandai 'bukan semata-mata oleh konflik, tetapi juga *'mutual admiration.'*'²⁸ Kekaguman timbal balik muncul selama diskursus karena komonalitas (kesamaan) di antara perspektif atau ide yang beranekaragam. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar karya Aristoteles mengandung agonisme, tetapi pentingnya konflik, bagi Arendt, terletak dalam kenyataan bahwa konflik dapat mengungkapkan komonalitas dari dunia bersama.²⁹ Pengakuan akan komonalitas mengandaikan intersubektivitas, relasi horizontal di antara orang yang terlibat dalam dialog. Kenyataannya, seperti dikatakan Villa, konsep politik Arendt secara luas didasarkan pada karakter unik pembicaraan deliberatif, yang menuntut bukan hanya pluralitas atau perbedaan perspektif, tetapi juga kesamaan dan komonalitas.³⁰

Robert Miller beragumen bahwa agonisme Arendt memiliki dua bentuk, yaitu persuasif dan polemik yang menuntut perdebatan substantif dalam sebuah proses yang panjang. Sekalipun demikian, kedua bentuk berbeda dalam arti bahwa agonisme persuasif dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain; sedangkan agonisme polemik dimaksudkan untuk membuat publik pandangan seseorang supaya menguji pandangan tersebut. Dalam agonisme persuasif, kesuksesan bergantung pada persuasi dan dalam agonisme polemik, kesuksesan bergantung pada kualitas kontroversi.³¹

28 Samuel Chambers, "Language and Politics: Agonistic Discourse in the West Wing, dalam <http://www.ctheory.net/articles>, 2013, hlm. 10

29 Andrew Schaap, "Political Theory and the Agony of Politics," dalam *Political Studies Review*, Vol. 5, 2007, hlm. 58

30 Dana Villa, *op. cit.*, hlm. 33

31 Patricia Roberts-Miller, *op. cit.*, hlm. 595

Hal inilah yang justru ditawarkan oleh kaum demokrat deliberatif sebagai alternatif terhadap pendekatan liberal. Bagi kaum demokrat deliberatif, sebuah keputusan kolektif harus merupakan hasil dari sebuah proses demokratis yang melibatkan semua dengan sarana argumentasi, yang ditawarkan oleh partisipan yang komit terhadap nilai-nilai rasionalitas dan imparsialitas.

Adalah Habermas dan Benhabib yang secara khusus berusaha untuk mempromosikan pendekatan demokratik deliberatif dari perspektif teori tindakan dan penilaian Arendt, sebagai sebuah alternatif terhadap pendekatan liberal. Ditarik dari konsep Arendt tentang kekuasaan, Habermas mengembangkan teori tindakan komunikatif, di mana dia menawarkan rasionalitas dialogis sebagai sebuah alternatif untuk mencapai konsensus di antara pandangan yang berbeda berkaitan dengan kebijakan publik. Berbeda dengan paksaan, kekuasaan muncul dari komunikasi dan kemudian menghasilkan konsensus. Habermas menulis: *“The power of agreement-oriented communication to produce consensus is opposed to this force, because seriously intended agreement is an end in itself and cannot be instrumentalized for other purpose.”*³²

Menurut Habermas, konsep Arendt tentang kekuasaan terbentuk dalam tindakan komunikatif karena kekuasaan berkaitan dengan pembentukan kehendak bersama dalam sebuah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian kesepakatan dan bukan pada pemenuhan keinginan masing-masing orang atau kelompok.³³ Bagi Habermas, bertolak dari perspektif Arendt, kekuasaan menunjuk pada *“a collective effect of speech in which reaching*

32 Jürgen Habermas, “Hannah Arendt’s Communication Concept of Power,” dalam *Social Research*, Vol. 44, No. 1, 1977, hlm. 7

33 Menurut Arendt, tindakan dan pembicaraan publik adalah prasyarat bagi kekuasaan dan karena itu kekuasaan merupakan karakteristik dari komunitas politik dan bukan properti dari individu. Kekuasaan adalah produk dari tindakan karena kekuasaan muncul dari aktivitas yang disepakati bersama dari pluralitas aktor. Kekuasaan ada hanya ketika orang bertindak dan berbicara bersama dalam semangat solidaritas demi tujuan bersama. Itulah yang disebut dengan kekuasaan komunikatif, yang diaktualisasikan dalam tindakan dan pembicaraan Arendt menawarkan struktur komunikatif dari tindakan di mana perbuatan menuntut sebuah ekspresi linguistik yang masuk akal untuk menjadi kondisi manusia dalam dunia: *“Speechless action would no longer be action because there would no longer be an actor, and the actor, the doer of deeds, is possible only if he is at the same the speaker of words.”* Bdk. Hannah Arendt, *The Human Condition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1958, hlm.178-179.

agreement is an end in itself for all those involved."³⁴ Dialog atau komunikasi intersubjektif berlangsung dalam sfer publik, entah dalam lembaga-lembaga legislatif ataupun dalam institusi-institusi sipil dan kekuasaan komunikatif muncul dari interaksi keduanya. Habermas menulis:

*Informal public opinion-formation generates 'influence'; influence is transformed into communicative power through the channels of political elections; and communicative power is again transformed into administrative power through legislation.*³⁵

Habermas mengklaim bahwa rasionalitas konsensual terimplisit dalam pembicaraan dan itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan politik. Hal ini mengisyaratkan bahwa rasionalitas bersifat publik hanya jika rasionalitas menaati aturan-aturan dari sebuah situasi pembicaraan yang ideal di mana kelompok yang terlibat berkomitmen untuk mencapai kesepakatan lewat komunikasi. Supaya sebuah proses pembuatan keputusan bersifat publik dan diskursif, dituntut sebuah situasi pembicaraan yang ideal di mana semua yang dipengaruhi oleh pembuatan keputusan diizinkan untuk berpartisipasi dan masukan dari semua peserta mendapatkan pertimbangan yang sama.

Habermas berargumen bahwa sebuah basis rasional untuk kehidupan kolektif dapat dicapai hanya kalau relasi sosial diorganisasikan sesuai dengan prinsip bahwa validitas dari setiap norma dibuat bergantung pada konsensus yang dicapai lewat proses komunikasi yang bebas dari dominasi. Keunggulan dari situasi pembicaraan ideal adalah bahwa pembicaraan itu mengarah kepada konsensus lewat diskursus rasional dan bebas dan bukan lewat kompromi, pertukaran atau manipulasi. Dasar dari konsensus adalah persuasi rasional, dalam arti bahwa selama proses deliberasi elemen-elemen rasional diharapkan masuk dan mempengaruhi diskursus karena kesamaan, kejujuran, keterbukaan dari semua peserta.

Sementara itu Seyla Benhabib menegaskan pentingnya pendekatan deliberatif Arendt yang diambil dari penilaian reflektif Kant. Berfokus

34 *Ibid.*, hlm. 6

35 Jürgen Habermas, "Three Normative Models of Democracy," dalam *Democracy and Difference—Contesting the Boundaries of the Political*, Seyla Benhabib (ed.), Princeton: Princeton University Press, 1996, hlm. 28

pada kategorisasi Arendt tentang tindakan dalam terang pluralitas, natalitas dan naratif, Benhabib mempertimbangkan penilaian Arendt sebagai kemampuan moral yang memampukan kita untuk berpikir dari perspektif orang lain. Tindakan dan deliberasi politik bergantung pada penilaian reflektif. Bagi Arendt, tindakan dan deliberasi mencakupi dan dimediasi oleh pelaksanaan kemampuan mental kita untuk penilaian reflektif, yang tidak dibatasi pada estetika tetapi itu adalah kemampuan kita yang paling politis. Dalam konteks penilaian reflektif inilah deliberasi kolektif hendaknya dilakukan demi melegitimasi secara rasional sebuah kebijakan politik.

Bagi Benhabib, sebuah proses pembuatan keputusan kolektif sah dan rasional hanya jika "*the institutions and their interlocking relationship are so arranged that what is considered in the common interest of all result from processes of collective deliberation conducted rationally and fairly among free and equal individuals.*"³⁶ Dalam proses deliberasi, semua orang yang berpartisipasi di dalamnya harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menginisiasi tindakan pembicaraan atau isu-isu untuk didiskusikan atau diperdebatkan; hak untuk mempertanyakan isu-isu yang diangkat; dan hak untuk menawarkan argumen reflektif tentang prosedur diskursus dan bagaimana argumen-argumen refleksi ini diaplikasikan.³⁷

Benhabib menganjurkan sebuah proses di mana deliberasi publik yang bebas di antara orang-orang sederajat dapat berlangsung. Dia memberikan tiga alasan mengapa sebuah proses pembuatan keputusan kolektif disebut rasional. *Pertama*, individu-individu yang berpartisipasi dalam deliberasi tidak dapat mengantisipasi perspektif yang berbeda-beda yang datang dari orang lain dan tidak dapat memiliki semua informasi tentang isu yang dibicarakan. Karena itu, dalam proses deliberasi, informasi baru disediakan untuk menginformasi semua peserta. Dalam konteks ini, deliberasi adalah sebuah prosedur demi memberikan informasi. *Kedua*, isu-isu etis dan politik yang sedang didiskusikan kompleks dan pendapat seseorang bisa saja bertentangan dengan pendapat atau keyakinan orang

36 Seyla Benhabib, "Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy, dalam *Constellation*, Vol. 1, No. 2, 1998, hlm. 30-31

37 *Ibid.*, hlm. 31

lain. Dalam konteks ini, proses deliberatif membantu peserta untuk menjadi sadar akan konflik ini dan siap untuk merevisi preferensi mereka sendiri. *Ketiga*, dalam proses deliberatif, setiap peserta mengartikulasikan pendapatnya sendiri dan supaya meyakinkan pendapat tersebut hendaknya refleksi dalam arti bahwa pendapat tersebut sudah dipikirkan secara mendalam dari sudut pandang semua orang yang terlibat. Dengan berbuat demikian, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pendapatnya sendiri dan dapat mengadopsi pendapat orang lain. Inilah yang disebut dengan ‘enlarged mentality’.³⁸

Seperti Habermas, Benhabib juga beranggapan bahwa tujuan utama dari deliberasi adalah untuk memperoleh konsensus atau apa yang disebutnya dengan ‘*the formation of conclusions*’. Benhabib beragumen bahwa lewat menyediakan informasi-informasi dan mengizinkan setiap orang untuk mengungkapkan argumen refleksif mereka, proses deliberatif akan mengantar pada konsensus atau pembentukan kesimpulan.³⁹ Berbeda dengan Habermas dan Benhabib, penulis beragumen bahwa deliberasi politik Arendt bukanlah sebuah argumen yang mengarah pada konsensus. Kenyataannya, deliberasi tidak mementingkan hasil. “*The purpose of the dialogues is never agreement as such; ... the process proves dramatically more significant than the endpoints.*”⁴⁰

Deliberasi tidak dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan, tetapi lebih menciptakan suasana di mana warga negara menghormati kewajiban dasar civilitas terhadap satu sama lain. Hal ini menuntut semua warga negara untuk berpikir melampaui kepentingan sempit mereka sendiri dan mempertimbangkan apa yang dapat dijustifikasi oleh orang yang tidak sepakat. Sebuah proses deliberatif sah hanya jika semua kepentingan, pendapat, dan perspektif yang ada dalam negara dimasukkan dalam deliberasi.⁴¹

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*, hlm. 44-45

40 Samuel Chambers, *op. cit.*, hlm. 9

41 Mengutip Kant, Arendt menulis: “*You know that I do not approach reasonable objections with the intention merely of refuting them, but that in thinking them over I always weave them into my judgments, and afford them the opportunity of overturning all my cherished beliefs. I entertain the hope that by thus viewing my judgments impartially from the standpoint of others some third view*

Sekalipun Arendt menggunakan term berjuang dalam hubungan dengan proses deliberatif, tetapi penggunaan term ini menunjuk pada nilai-nilai yang penting dalam dunia bersama kita, seperti ketenaran dan semangat berjuang. Model perjuangan seperti ini dipakai bukan karena keinginan untuk balas dendam dan kebencian, tetapi sebaliknya, demi kebaikan dunia bersama. Karena itu, tujuan utama deliberasi publik adalah untuk mentransformasi sudut pandang atau preferensi seseorang. Transformasi berarti bahwa warga negara memahami kodrat perbedaan-perbedaan mereka. Mencapai pemahaman seperti itu tidak mengimplikasikan identifikasi karena memahami perspektif orang lain dapat berarti telah dilewati pengungkapan yang sukses dari pengalaman dan perspektif mereka sehingga perspektif lain dipelajari. Lebih lanjut, bagian yang mereka pahami tetap sebagai latarbelakang dari pengalaman dan perspektif mereka sendiri dan membantu mentransendensikan subyektivitas mereka masing-masing.

Transformasi pandangan atau argumen dapat terjadi dalam tiga cara: *pertama*, menyadari parsialitas interese, pandangan atau posisi masing-masing setelah konfrontasi dengan yang lain. *Kedua*, pengetahuan, di mana orang yang terlibat dalam konfrontasi dan kritik perspektif masing-masing untuk menemukan dasar bersama bagi problem-problem tertentu, memiliki kekuasaan atas individu untuk mentransformasi interese masing-masing yang merujuk pada prinsip keadilan. *Ketiga*, proses untuk mengungkapkan, mempertanyakan dan mengkritisi pendapat-pendapat yang berbeda pada akhirnya akan membawa pengetahuan tambahan kepada semua peserta. Lewat mendengarkan argumen-argumen yang berbeda seseorang dapat memahami sesuatu tentang bagaimana orang lain dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang mereka pertahanakan dan karena itu memperoleh gambaran yang lengkap tentang proses sosial di mana parsialitas seseorang terenjawahtahkan. Obyektivitas sosial yang komprehensif ini meningkatkan kebijaksanaan dalam semua partisipasi yang dapat mengantarkan mereka bersama untuk menemukan solusi yang

that will improve upon my previous insight may be obtainable." Bdk. Hannah Arendt, *Lectures on Kant's Political Philosophy*, Ronald Beiner (ed.), Chicago: The University of Chicago Press, 1992, hlm. 42.

adil untuk persoalan-persoalan bersama.⁴²

Dalam observasi saya, pembicaraan politik atau deliberasi Arendt lebih cocok dengan ide bahwa deliberasi adalah sebuah proses bukan pertama-tama untuk mencapai konsensus, tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang sama untuk sebuah persoalan. Atau dengan kata lain, kesimpulan Habermas dan Benhabib bahwa proses deliberatif bertujuan untuk mencapai konsensus tidak cocok dengan posisi Arendt. Dalam pandangan Arendt, deliberasi bukanlah sebuah proses untuk mencapai konsensus tetapi sebuah aktivitas yang berlangsung dalam sfer publik di mana orang saling menukarkan ide-ide atau pendapat-pendapat mereka dan berdiskusi perbedaan-perbedaan mereka untuk mendapatkan pemahaman bersama atas isu-isu bersama. Inilah alasan utama Arendt menolak ide tentang kebenaran dalam kehidupan politik. Konsensus, dalam perspektif Arendt, mengandaikan ditemukannya unsur kebenaran dalam pembicaraan atau deliberasi publik.

Menurut Arendt, kehidupan politik tidak berurusan dengan persoalan adanya kebenaran, entah rasional atau faktual, tetapi hanya dengan persoalan yang tidak mempunyai jawaban yang benar, dengan topik yang tidak hanya mengizinkan diskusi dan opini-opini yang berbeda-beda tetapi menuntut penilaian yang tepat. Hal ini penting untuk menghindari politik dari kecenderungan untuk direduksi pada realisasi kebenaran absolut entah itu religius atau sekular. Ketika Hitler mengklaim bahwa apa yang dipikirkannya benar maka kebenaran tersebut dipaksakan kepada orang dan diterima secara tidak kritis atau tanpa penilaian. Misalnya, prinsip dominasi total 'segala sesuatu itu mungkin', dianggap benar, maka 'kebenaran' tersebut mendorong kaum Nazi melakukan segala sesuatu termasuk membunuh sesamanya orang Yahudi. Di samping itu, bagi Arendt, kebenaran bersifat despotis karena memaksa persetujuan universal sehingga mengabaikan kebebasan, mengeliminasi pluralitas pendapat dan mereduksi kekayaan wacana manusia hanya pada satu wacana tunggal yang dianggap benar. Arendt menulis: "Model pemikiran dan komunikasi yang berurusan dengan kebenaran, jika dilihat dari

42 Irish Young, *op. cit.*, hlm. 128

perspektif politik, terlalu mendominasi karena tidak mempertimbangkan pendapat masyarakat.”⁴³

Karena politik tidak berurusan dengan kebenaran maka topik-topik yang dibicarakan dalam pembicaraan politik atau diskusi publik berkaitan dengan pendapat-pendapat. Persoalan politik adalah persoalan di mana pilihan atau pendapat seseorang tidak dapat ditentukan oleh kriteria obyektif. Validitas pendapat-pendapat bergantung pada kesepakatan dan persetujuan bebas sesudah melewati proses diskursif, representatif dan dikomunikasikan lewat sarana persuasi (ibid.). Jadi, karena politik hanya berurusan dengan topik-topik yang tidak tunduk pada kebenaran, validitas pendapat-pendapat politik terletak pada pertimbangan tentang pluralitas perspektif. Pendapat bergantung pada bagaimana pespektif berbeda-beda diintegrasikan ke dalam pembentuk sebuah penilaian:

*The more people's standpoints I have present in my mind while I am pondering a given issue, and the better I can imagine how I would feel and think if I were in their place, the stronger will be my capacity for representative thinking and the more valid my final conclusions, my opinion.*⁴⁴

Arendt berkeyakinan bahwa kemampuan pemikiran kita hanya dapat berkembang dalam konteks dialog. Pendapat merupakan bentuk pengetahuan yang paling khas dan unik, yang muncul dari deliberasi kolektif warga negara dan yang menuntut penggunaan imajinasi dan kemampuan untuk berpikir secara representatif. Lewat deliberasi secara bersama dan terlibat dalam pemikiran representatif, warga negara mampu membentuk pendapat yang dapat mengklaim validitas intersubjektif. Menurutnya, jaminan satu-satunya kebenaran pemikiran kita adalah bawa kita berpikir dalam kebersamaan dengan orang lain; di mana kita mengkomunikasikan pemikiran kita dan pada saat yang sama orang tersebut mengkomunikasikan pemikiran mereka kepada kita. Pembelaan Arendt atas pendapat harus dimengerti sebagai pembelaan atas deliberasi politik dan peran yang dimainkan persuasi dalam urusan yang mempunyai akibat untuk komunitas politik. Dia menegaskan

43 Hannah Arendt, *Between Past and Future*, op. cit., hlm. 241

44 *Ibid.*, hlm. 247

kembali nilai dan pentingnya wacana politik, deliberasi dan persuasi dan selanjutnya politik yang mengakui perbedaan dan pluralitas pendapat. Politik berurusan dengan manusia yang mensyeringkan dunia bersama dan ruang penampakan di mana perbedaan-perbedaan dan komonalitas muncul dan secara demokratis didiskusikan.

PENUTUP

Setelah mempertimbangkan pendekatan liberal dan deliberatif atas kenyataan pertentangan pandangan dalam sebuah komunitas pluralistis, menjadi jelas bahwa model demokratis deliberatif menawarkan sebuah pendekatan yang melampaui netralitas dan toleransi, seperti dianjurkan kaum liberal modern. Dari ide Arendt tentang pembicaraan politik, ketidaksepakatan dalam politik tidak harus dipecahkan dengan semata-mata tawar menawar interese individu-individu atau grup, tetapi mendorong semua warga negara untuk bertindak sebagai pribadi-pribadi yang berpikir. Hal ini menuntut bahwa setiap kebijakan atau tindakan hendaknya diatur sedemikian rupa untuk mendorong warga negara untuk berpikir tentang itu dan produk pemikiran dapat diterima oleh orang lain yang akan diatur oleh kebijakan tersebut.

Ide utama dari pandangan deliberatif menuntut semua warga negara, dalam semangat kebersamaan, menemukan alasan-alasan yang dapat diterima secara politis di bawah kondisi pluralisme yang masuk akal. Hal ini tidak semata-mata memberikan pertimbangan yang sama terhadap masing-masing posisi dan mengakomodasi interese-interese dari individu-individu, tetapi lebih dari itu, kodrat masing-masing posisi dikedepankan dan menjadi subyek deliberasi dan melalui proses deliberasi sebuah pemahaman baru dari posisi masing-masing diharapkan diperoleh. Karena itu, tujuan dari proses deliberatif haruslah pertama-tama mentransformasi pemahaman seseorang. Atau, lewat menguji sebuah isu dari perspektif yang berbeda-beda, setiap individu memodifikasi dan memperluas pandangan mereka masing-masing. Hanya dalam konteks argumentasi atau debat publik, pandangan seseorang dibentuk, diuji dan diperluas.

Pendekatan deliberatif memang cocok untuk persoalan-persoalan publik yang tidak perlu diregulasikan dalam sebuah kebijakan publik.

Tetapi, bagaimana dengan persoalan-persoalan yang harus diatur dalam kebijakan-kebijakan publik? Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa sebuah kebijakan perlu diputuskan dan dinilai dalam dialog terbuka tanpa dominasi dan tekanan. Hal ini mengandaikan beberapa persyaratan berikut.

Pertama, sebuah kebijakan harus diputuskan bersama atau merupakan hasil dari sebuah proses panjang deliberasi yang melibatkan semua warga yang bakal merasakan ataupun menjadi sasaran kebijakan itu sendiri. Ini mengandaikan suatu keyakinan bahwa membuat keputusan merupakan kemampuan khas semua pelaku politik (semua warga negara dan bukannya hanya elite politik) untuk menentukan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan dalam wilayah publik dan tujuan-tujuan yang cocok dan layak dikejar. Hal ini hanya mungkin dicapai dalam sebuah forum publik di mana individu-individu diberi kesempatan yang sama untuk bertukar pikiran tentang persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan bersama mereka. Justru kemampuan inilah yang diabaikan pemerintah kita selama ini, di mana perumusan sebuah kebijakan tidak melibatkan masyarakat dari awal karena anggapan keliru bahwa masyarakat apolitis, tidak tahu banyak tentang persoalan-persoalan publik.

Kedua, walaupun harus dirumuskan oleh pemerintah atau wakil-wakil rakyat terhormat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka ketika merumuskan sebuah kebijakan, mereka hendaknya mengingat apa yang dikatakan oleh Hannah Arendt bahwa pemikiran politik adalah representatif. Para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan secara matang persoalan dari sudut pandang yang berbeda, dengan menghadirkan dalam pemikiran mereka sendiri sudut pandang orang yang tidak hadir (rakyat yang diwakili). Semakin banyak sudut pandang orang yang dihadirkan dalam proses pemikiran atas sebuah kebijakan dan semakin baik pengambil kebijakan membayangkan, merasakan dan sekaligus menempatkan diri dalam posisi orang-orang yang diwakili, maka akan semakin representatif dan valid kesimpulan dan keputusan yang diambil. Untuk itu metode dengar pendapat, turun ke bawah bukanlah sekedar

sebuah seremoni asal-asalan dan formalitas untuk menghamburkan uang, tetapi sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan menampung aspirasi (sudut pandang) masyarakat dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Ketiga, sesudah dirumuskan—entah secara bersama ataupun oleh wakil-wakil rakyat—sebuah kebijakan perlu disosialisasikan untuk dinilai kembali dalam sebuah komunikasi dialogal yang transparan dan bebas kepentingan. Warga negara memiliki kemampuan untuk menilai sebuah kebijakan dari berbagai aspek, baik negatif maupun positif. Untuk bisa dinilai secara efektif, sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan secara benar, tepat, jelas, dan jujur. Kebenaran dan ketepatan mengandaikan bahwa apa yang dipikirkan, dirumuskan, dan dikatakan senantiasa merujuk pada fakta di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dirumuskan sungguh-sungguh mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bukan fakta yang diandaikan, direkayasa, dan dipolitisasikan. Kebijakan itu juga perlu dikomunikasi secara jelas dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang berpendidikan rendah untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman. Masyarakat yang memiliki daya tangkap rendah tidak mampu memahami istilah-istilah abstrak dan ilmiah serta argumen-argumen yang rumit dan berbelit.

Pembentukan sebuah kebijakan publik tidak pernah merupakan sebuah aktivitas yang soliter, tetapi sebaliknya menuntut pertemuan yang jujur dengan pendapat-pendapat yang berbeda sehingga kebijakan diuji dari semua sudut pandang yang mungkin. Sebuah kebijakan harus dibuat transparan oleh terang pemahaman yang utuh dari semua warga negara sehingga mereka diberi peluang untuk menilainya dan bukannya sekedar “memaafkan”. Kalau saja rakyat dilibatkan sejak awal, pemerintah dan wakil-wakil rakyat berpikir representatif, dan sosialisasi dibuat secara benar, tepat, jujur, dan jelas, maka sebuah kebijakan yang dirumuskan tidak akan kontroversial. Dan, kalau saja sebuah perbedaan pandangan yang sulit direkonsiliasikan, dibiarkan tetap menjadi topik diskursus dan deliberasi yang terbuka, bebas, dan rasional, maka terbuka kemungkinan

bagi masing-masing orang atau kelompok untuk diperbaharui, diperluas sudut pandang mereka masing-masing. ***

DAFTAR RUJUKAN

- Hannah Arendt. *Men In Dark Times*. New York: A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, 1955.
- . *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.
- . *Between Past and Future*. New York: The Viking Press, Inc., 1961.
- . *Crises of the Republic*. New York: A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, 1972.
- . *Lectures on Kant's Political Philosophy*. Ronald Beiner (ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics* (1999), Terence Irwin (trans.). Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1999.
- Benhabib, Seyla. "Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy." Dalam *Constellation*, Vol.1, No. 2., 1998.
- Chambers, Samuel A. "Language and Politics: Agonistic Discourse in the West Wing." Dalam <http://www.ctheory.net/articles>, 2013.
- Cohen, Joshua. "Democracy and Liberty." Dalam *Deliberative Democracy*, John Elster(ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Descartes. *Discourse on Method*, VI: 62. Dalam *The Philosophical Writings of Descartes*, John Cottingham, cs. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Disch, Lisa. "Democracy, Difference, and Plurality." Dalam *The Newsletter of PEGS*, Vol. 2. No.2., 1002.
- . *The Tyranny of the Two-Party System*. New York: Columbia University Press, 2002.
- Gore, Albert. *The Assault of Reason*. Inggris: Penguin Books Ltd., 2017.
- Gutmann, Amy and Thompson, Dennis. *Democracy and Disagreement*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
- Habermas, Jurgen. "Three Normative Models of Democracy. Dalam *Democracy and Difference—Contesting the Boundaries of the Political*, Seyla Benhabib (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1996b.

- . "Hannah Arendt's Communications Concept of Power." Dalam *Social Research*, Vol. 44, No. 1, 1977.
- Honig, Bonnie. *Political Theory and the Displacement of Politics*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.
- . "Toward An Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics of Identity." Dalam *Feminist Interpretation of Hannah Arendt*, Bonnie Honig (ed.). Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1995.
- Knauer, James T. "Rethinking Arendt's Vita Activa: Toward A Theory of Democratic Praxis." Dalam *Praxis International* Vol. 5, NO. 2. 1985.
- Mouffe, Chantal. "Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?" Dalam *Social Research*, Vol. 66, No. 3., 1999.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1996.
- Roberts-Miller, Patricia. "Fighting without Hatred: Hannah Arendt's Agonistic Rhetoric." Dalam *Jac*, Vol. 22, No. 3., 2002.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Reveries of the Solitary Walker*. Penerj. Peter France. London: Penguin Books Ltd., 1979.
- Schaap, Andrew. "Political Theory and the Agony of Politics." Dalam *Political Studies Review*, Vol. 5., 2007.
- Schmitz, Kenneth. "Is Liberalism Good Enough?" Dalam *Liberalism and the Good*. R. Bruce Douglass, Gerald M. Mara, and Henry S. Richardson (ed.). London: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1990.
- Taylor, Charles. *The Ethics of Authenticity*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- Villa, Dana. *Arendt and Heidegger: The Fate of the Political*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Young, Iris. "Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy." Dalam *Democracy and Difference*, Seyla Benhabib, ed., Princeton: Princeton University Press, 1996.